

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah dituntut untuk mengelola daerahnya sendiri karena sistem desentralisasi. Upaya daerah harus dapat mengelola potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sendiri. Sehingga meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Sebagaimana diketahui bahwa di daerah khususnya kabupaten terlalu banyak bergantung terhadap pusat sedangkan dana dari pemerintah pusat tersebut terbatas. Dengan daerah yang hanya bergantung terhadap pusat maka tujuan untuk melaksanakan tujuan otonomi daerah akan sulit untuk menyelenggarakannya.

Hal ini senada dengan pernyataan Pamudji (2001 : 125) berikut : Pemerintahan daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui kemampuan daerahnya sendiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai kemampuan sendiri meski masih ada campur tangan pemerintah pusat karena pemerintah masih ada tanggung jawab untuk mengatur dan melihat perkembangan daerah serta menjalankan roda perekonomian yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sebelum mengelola potensi daerah tersebut, harus

mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Setelah itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena jika kita dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dapat mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Sejak adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Karena kesejahteraan masyarakat akan banyak bergantung pada pemerintah daerah. Salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintahan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Begitu pula sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah

semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Di Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Menurut Kurniawan dkk, (2006 : 47) berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Menurut Mardiasmo (2001 : 93) mengatakan bahwa “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah”. Sedangkan dalam Zain dkk (2002 : 370) mengatakan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh suatu daerah, serta pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Dan adapula Jenis Pajak Kabupaten atau Kota yaitu :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan efektivitas. Karena dengan menghitung efektivitas pajak dan retribusi daerah, dapat mengetahui kinerja pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikategorikan efektif apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan. Memilih Kabupaten bangkalan sebagai tempat penelitian karena Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kawasan perkembangan Surabaya, serta tercakup

dalam lingkup Germakertosusila. Apalagi dengan dibangunnya jembatan penyeberangan SURAMADU, yang menghubungkan secara langsung jalur darat antara Surabaya dan Bangkalan, tentunya akan berdampak positif bagi pengembangan Industri Perdagangan dan Investasi di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan potensi yang ada. Dengan adanya pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Bangkalan seperti adanya pembangunan Stadion Gelora Bangkalan, Banplaz dan lain-lain. Sehingga ada penambahan masukan pajak dan retribusi daerah. Namun masih belum meningkatkan taraf kehidupan dan taraf ekonomi masyarakatnya. Dimana pajak dan retribusi daerah merupakan peran penting yang cukup besar terhadap kontribusi PAD, serta untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga laju pertumbuhan penduduk, stabilitas politik dan perekonomian akan meningkat seiring besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan potensi yang cukup besar. Maka permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya yang berkaitan tentang penggalian sumber-sumber seperti pajak dan retribusi yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah secara maksimal. Karena kontribusi pajak di Kabupaten Bangkalan selama 10 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2014 rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 20,58 persen dan retribusi lebih memberikan kontribusi terhadap PAD lebih besar dari pada pajak dengan rata-rata kontribusinya sebesar 39,28

persen. Untuk mengetahui lebih jelas penerimaan masing - masing sumber terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lihat pada tabel berikut

Tabel 1.1
Kontribusi Masing – Masing Sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan
Tahun 2005 – 2014 (%)

Tahun Anggaran	Kontribusi Pajak Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah	Kontribusi Kekayaan Daerah	Kontribusi Lain - Lain Pendapatan Daerah
2005	22,69	47,52	1,53	28,24
2006	20,29	51,74	1,47	26,48
2007	22,33	54,01	1,73	21,90
2008	21,79	55,21	3,02	19,96
2009	24,15	54,68	3,33	17,91
2010	20,87	28,25	2,96	47,90
2011	19,38	27,42	2,72	50,46
2012	18,57	28,45	2,31	50,65
2013	18,48	30,92	1,62	49,00
2014	17,28	14,65	1,10	66,95
Rata-rata	20,58	39,28	2,17	37,94

Sumber : Dispenda Kabupaten Bangkalan (2015), data diolah

Pada tabel di 1.3 dilihat dari kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan yang paling

memberikan kontribusi adalah retribusi daerah yang memperoleh rata-rata sebesar 39,28%. Sedangkan pajak daerah memberikan rata-rata kontribusi terhadap PAD yang sebesar 20,58 persen dan kontribusi tersebut masih tinggi kontribusi lain-lain pendapatan daerah terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 37,94 persen. Dari kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling terkecil adalah kontribusi kekayaan daerah yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,17 persen. Hal ini membuktikan bahwa retribusi daerah mempunyai potensi yang besar dalam penerimaan daerah di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan pajak daerah cukup memberikan kontribusi dalam penerimaan daerah.

Seharusnya pajak daerah memiliki potensi yang besar apalagi sejak diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, komponen bagi hasil pajak untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semulanya dan perimbangan dari Pemerintahan Pusat serta pajak Air Tanah yang semulanya merupakan bagi hasil Provinsi kini di alihkan menjadi pajak daerah. Sehingga pajak daerah di Kabupaten Bangkalan ada 11 jenis pajak yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sehingga pada

2011 ada tambahan penerimaan pajak sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak jadi kontribusi terhadap PAD meningkat pula. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2005 sampai dengan 2014 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2014

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2005	4.726.116.000,00	5.519.315.216,00
2006	5.379.927.900,00	5.835.507.134,00
2007	5.699.085.300,00	6.524.048.029,00
2008	6.915.204.860,00	6.998.126.963,00
2009	7.361.351.860,00	8.321.972.033,00
2010	8.540.245.500,00	8.558.677.480,00
2011	11.409.511.511,00	12.607.491.954,00
2012	13.979.016.185,00	14.906.524.548,50
2013	15.162.616.409,00	17.089.402.540,00
2014	20.159.751.409,00	23.470.520.177,00
Total	99.332.826.934,00	109.831.586.074,50

Sumber : Dispenda Kabupaten Bangkalan (2015)

Dari tabel 1.2 menjelaskan bahwa total realisasi lebih besar dari total target yaitu total target sebesar Rp 99.332.826.934 dan sedangkan total realisasi sebesar Rp 109.831.586.074. Ini menunjukkan bahwa pajak

daerah di Kabupaten Bangkalan telah mencapai target yang telah ditentukan. Mengalami peningkatan yang lebih tajam dari 2010 sampai 2011 karena pada tahun 2011 dengan adanya pengalihan Pajak Air Tanah, PBB, dan BPHTB menjadi pajak daerah yang semulanya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga ada penambahan penerimaan pajak daerah yang menyebabkan terjadinya peningkatan di tahun 2011 dan mengalami peningkatan terus meningkat pada 2014. Pada 2014 realisasi tertinggi selama 10 tahun terakhir Jadi pajak daerah Kabupaten Bangkalan sudah optimal dengan sesuai bahwa pajak daerah menjadi sebagai potensi yang dimiliki Kabupaten Bangkalan. Tiap tahunnya pajak daerah mengalami peningkatan.

Apalagi mengalami perbedaan jauh dengan target. Berbeda dengan retribusi, tabel berikut menjelaskan tentang target dan retribusi daerah di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 – 2014

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Di Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2014

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
2005	11.357.156.429,00	11.557.820.252,41
2006	14.263.936.779,00	14.881.286.436,00
2007	15.907.413.348,00	15.776.273.397,37
2008	17.287.097.148,00	17.726.960.883,00
2009	18.132.673.517,00	18.837.751.499,61
2010	12.237.707.946,00	11.582.515.251,82
2011	18.867.870.233,00	17.840.109.824,50
2012	20.470.457.233,00	22.838.667.099,00
2013	33.761.357.204,00	28.591.339.751,55
2014	23.193.735.019,00	19.900.396.017,76
Total	185.479.404.856,00	179.533.120.413,02

Sumber : Dispenda Kabupaten Bangkalan (2015)

Pada tabel 1.5 terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah paling tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp 28.591.339.751 meski tidak mencapai target sebesar Rp 33.761.357.204 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar Rp 19.900.396.017 meski target sudah di turunkan dari tahun 2013 sebesar Rp 23.193.735.019. sehingga realisasi penerimaan retribusi daerah belum optimal. Apalagi total target lebih tinggi dari total realisasi retribusi daerah sebesar Rp 185.479.404.856 sedangkan target realisasi retribusi daerah sebesar Rp 179.533.120.413. Sangat di

sayangkan lebih tinggi target dari pada realisasi daerah karena retribusi daerah sebagai potensi daerah di Kabupaten Bangkalan. Realisasi retribusi daerah mencapai targetnya hanya beberapa tahun dari 10 tahun terakhir dan mengalami naik turun. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, meski tiap tahunnya selalu di atas target dan mengalami peningkatan tiap tahunnya namun kontribusi terhadap PAD lebih menyokong retribusi daerah. Melihat pajak dan retribusi daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial untuk mengangkat pembangunan daerah Sehingga perlu pembenahan terhadap retribusi daerah oleh pemerintah daerah. penelitian terdahulunya merupakan penelitian sebelumnya Achmad Asrul Arif, Universitas Trunojoyo Madura (2014) yang berjudul Analisis Peranan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya yang membedakan dengan penelitian ini seperti penambahan variabel. Melihat 2 potensi sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki peran dalam menghasilkan pendapatan daerah. Maka oleh penulis menarik untuk di angkat ke penelitian lebih lanjut, yang di tuang dalam bentuk usulan yang berjudul **“Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Perekonomian Di Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas yang menjelaskan pajak dan retribusi daerah yang termasuk dalam konteks perekonomian di Kabupaten Bangkalan, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bangkalan tahun 2005 – 2014 ?
2. Seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten bangkalan pada tahun 2005 - 2014 ?
3. Sejauh mana tingkat efektivitas yang dicapai penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 - 2014 ?
4. Sejauh mana tingkat elastisitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Laju Inflasi di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 – 2014 ?
5. Bagaimana trend penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bangkalan selama 3 tahun ke depan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengajukan tujuan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bangkalan tahun 2005 – 2014
2. Mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten bangkalan pada tahun 2005 – 2014
3. Mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas yang dicapai penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 - 2014
4. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat elastisitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh karena Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Laju Inflasi di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 – 2014

5. Melihat penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bangkalan selama 3 tahun ke depan agar mendorong kinerja pemerintah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang ingin melakukan penelitian
2. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya tentang pendapatan daerah, keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini terbagai menjadi lima bab.

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang termuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran atau alur penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, objek penelitian, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari